



PERAN KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA (KORPOLAIRUD) DALAM MENJAGA KEAMANAN DI WILAYAH SELAT SUNDA

THE ROLE OF KORPOLAIRUD IN MAINTAINING SECURITY IN THE SUNDA STRAIT AREA

Sukoco, Windy Darmawan dan Naszifa Indradi

Prodi Strategi Pertahanan Udara

Fakultas Strategi Pertahanan

Universitas Pertahanan RI

akhdanbagus@gmail.com

Abstrak

Selat Sunda merupakan jalur pelayaran yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI) yang dilalui oleh kapal barang, kapal tanker, kapal tunda, kapal penangkap ikan serta kapal dan kapal militer. Untuk mencegah dan menindak kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan tersebut, maka peran dan keberadaan kapal polisi dan pesawat polisi sangat diperlukan. Oleh karena itu, Korpolairud yang bertugas mengamankan perairan laut dan udara juga merupakan bagian penting dari kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat kamtibmas yang berkaitan atau berkaitan dengan perairan laut dan udara. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif didukung dengan studi literatur sebagai metode dalam penelusuran data dan fakta, dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Strategi Ditpolairud dalam meningkatkan perannya dalam mengamankan Selat Sunda Daerah melalui pemanfaatan teknologi untuk lebih memudahkan pelaksanaan patroli udara Polri. Strategi ini diimplementasikan melalui penggunaan kamera pengawas pada pesawat yang sudah dilengkapi dengan sensor termal. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya pesawat berteknologi tinggi untuk pelaksanaan patroli udara polisi dalam rangka pengamanan kawasan Selat Sunda.

Kata kunci: Korpolairud, Ditpoludara, Selat Sunda, Skema Pemisahan Lalu Lintas

Abstract The Sunda Strait is a shipping lane that is part of the Indonesian Archipelagic Sea lane I (ALKI) which is traversed by cargo ships, tankers, tugboats, fishing vessels and military ships and ships. In order to prevent and take action against crimes or criminal acts that occur in these territorial waters, the role and presence of police ships and police aircraft is very necessary. Therefore, Korpolairud with the task of securing sea and air waters is also an important part of the police in maintaining security and public order or abbreviated as "kamtibmas" relating to or relating to sea



and air waters. Then this study uses a qualitative approach with a descriptive analysis method supported by a literature study as a method in data and fact tracking, where based on the results of the study it is known that the Ditpolairud Strategy in increasing its role in securing the Sunda Strait Region through the use of technology to further facilitate the implementation of police air patrols. This strategy is implemented through the use of surveillance cameras on aircraft that are already equipped with thermal sensors. The obstacle faced is the limited number of aircraft equipped with high technology for the implementation of police air patrols in the context of securing the Sunda Strait area..

Keywords: Korpolaairud, Ditpoludara, Sunda Strait, Traffic Separation Scheme

1. PENDAHULUAN

Selat Sunda adalah wilayah perairan di Indonesia yang menjadi penghubung antara Laut Jawa serta Samudera Hindia, yang memisahkan Pulau Sumatera serta Pulau Jawa secara geografis, batasan Selat Sunda disebelah utara merupakan dibatasi oleh garis yang menghubungkan dari barat ke timur ialah Tanjung Sumur Batu pada posisi koordinat $5^{\circ} 50' LS$ serta $105^{\circ} 47' BT$, di tepi laut di wilayah bagian di Sumatera tepatnya ke wilayah Tanjung Pujut pada posisi koordinat $5^{\circ} 53' LS$ serta $105^{\circ} 02' BT$ di tepi laut sebelah barat Laut Pulau Jawa sebaliknya batasan disebelah selatan dibatasi garis yang menghubungkan dari barat ke Timur ialah Tanjung Guha Kolak pada posisi koordinat $6^{\circ} 50' LS$ serta $105^{\circ} 15' BT$ di Tepi laut barat di wilayah Jawa ke wilayah lain yaitu Tanjung Cuku Balimbing pada posisi koordinat $t 5^{\circ} 56' LS$ serta $105^{\circ} 33' BT$ di tepi laut sebelah selatan Pulau Sumatera

Selat Sunda ialah salah satu wilayah yang dijadikan sebagai jalur pelayaran yang merupakan bagian dari ALKI I (alur Laut Kepulauan Indonesia I) yang dilalui oleh berbagai jenis kapal, dimana lalu lintas beberapa jenis kapal seperti kapal kargo, kapal tangker, kapal ikan maupun kapal militer serta kapal-kapal yang menggunakan Selat Sunda, untuk melintas dari Samudera Hindia ke Laut Jawa atau melanjutkan ke Samudera Pasifik atau sebaliknya. Selain itu, di sisi sebelah barat Selat Sunda khususnya yang berhubungan dengan daratan Pulau Sumatera terdapat pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Sumatera yaitu pelabuhan Bakauheni yang merupakan wilayah yang memiliki pelabuhan yang berfungsi



sebagai penghubungan dengan Pulau Jawa yaitu pelabuhan Merak, dimana melalui pelabuhan tersebut, maka jarak antara kedua pulau tersebut bisa dipangkas menjadi ± 30 km dengan tempuh kapal penyeberangan yang hanya membutuhkan waktu sekitar sekitar 1,5 jam.

Mengacu pada uraian tersebut, maka dapat di asumsikan bahwa Wilayah selat sunda merupakan salah satu wilayah yang menghubungkan transportasi laut tersibuk di Indonesia, dimana di wilayah penyeberangan Bakaheuni saja, terdapat beberapa fasilitas penyebrangan seperti terdapatnya 4 dermaga Ro-Ro, 1 Dermaga dengan jenis plengsengan dan 1 dermaga yang dihususkan sebagai berlabuhnya kapal cepat Ponton, dan 1 dermaga untuk jenis kapal plengsengan

Beberapa Indikator yang menjadikan pelabuhan-pelabuhan di wilayah selat Sunda menjadi wilayah tersibuk di Indonesia terlihat dari intensitas kapal-kapal yang melintas, hal tersebut terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Puskodal Lanal Banten yang menyebutkan bahwa, jumlah kapal yang melintas, dari rentang waktu 2007-2015 sekitar 29.351 kapal yang melintas di wilayah tersebut, dimana, sebagaimana yang telah di uraikan diatas, bahwa kapal yang berlintas berjenis kapal kargo, kapal container, kapal tangker, Kapal Militer, kapal pesiar, kapal tangkap ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan tahun 2016 jumlah kapal yang melintas Selat Sunda berjumlah 6644 kapal.

Peningkatan secara signifikan kapal-kapal yang melintas di Selat Sunda mulai tahun 2012 s.d 2016, beberapa kemungkinan adanya kepadatan lalu lintas pelayaran Selat Malaka. Kepadatan tersebut pengguna jasa laut beralih melintas di Selat Sunda. Akibatnya resiko yang kemungkinan terjadi yaitu rawan kecelakaan/tubrukan kapal, kegiatan illegal, kejahatan di perairan dan lainnya.

Besarnya potensi dan sumber daya yang terdapat di Selat Sunda berimplikasi pada pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait. Hal yang mengakibatkan tumpang tindih terhadap tata ruang wilayah Laut di ALKI Selat Sunda. Dan pelanggaran yang terjadi, hal tersebut terlihat dari beberapa



pelanggaran yang terjadi di wilayah selat sunda, seperti yang terjadi pada tahun 2017 yang lalu, diketahui bahwa di wilayah tersebut terjadi penangkapan Kapal Wanderlust yang menyelundupkan Narkoba dengan jenis sabu-sabu 1 (satu) ton.

Penyelundupan Sabu-sabu tersebut dilakukan oleh WN Taiwan di sekitar wilayah Pantai Anyer dekat dengan perairan Selat Sunda di Serang, selain itu, terdapat pula aktifitas ilegal yang memanfaatkan wilayah laut sebagai sarana, seperti yang dilakukan oleh kapal Tanker MT. Aisyah 08 yang diketahui menerima sebanyak 700 Ton Limbah kimia dari kapal MT.Global Pioner yang berbendera Panama. Kemudian peristiwa yang umum terjadi di wilayah selat sunda lainya selain kegiatan kriminal adalah eskalasi kecelakaan yang pernah beberapa kali terjadi di wilayah tersebut, seperti kecelakaan yang menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) bernama Windu Karsa Dwitya dengan KMP Virgo di wilayah yang dijadikan sebagai alur penyeberangan dan juga perlintasan Merak-Bakauheni dengan jarak sekitar 1.5 mil laut dari wilayah Merak, dimana peristiwa tersebut terjadi pada medio April 2019.

Kemudian data kejadian pada tahun 2020, dilaporkan bahwa telah terjadi sekitar 12 kasus dengan bentuk illegal logging seperti penyelundupan Senpi (Senjata Api) Narkoba dengan beberapa jenis dan varian, serta penyelundupan barang berharga lainnya, sehingga dengan mengacu pada data tersebut, dapat di asumsikan baha wilayah selat sunda memiliki eskalasi ancaman yang sangat tinggi dari berbagai aspek (Amalia, 2017)

Guna mencegah serta menindak aksi kriminal maupun beberapa tindak pidana yang berada di wilaya perairan tersebut maka peran dan kehadiran kapal polisi beserta Pesawat udara Polri sangat diperlukan. Korpolairud Baharkam Polri sebagai salah satu bagian integral Polri yang mempunyai tugas melaksanakan pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, (Kapolri, 2017) selalu dituntut kesiapan baik sumber daya manusia maupun alat Utama berupa kapal polisi dan pesawat udara polri dalam mendukung tugas



tersebut, maka untuk mengantisipasi setiap perkembangan ancaman gangguan kamtibmas, menuntut Korpolairud berperan aktif dan ikut serta melalui upaya atau langkah peningkatan kemampuan operasional khususnya di wilayah perairan maupun udara, guna menanggulangi tindak pidana kejahatan di wilayah perairan selat sunda yang merupakan jalur ALKI I.

Sebagai upaya untuk mewujudkan wilayah Selat Sunda yang kondusif dan bebas dari aksi kriminalitas, maka perlu adanya sinergitas dari seluruh aspek maritim di wilayah selat sunda untuk membantu dan berperan dalam pengamanan wilayah Selat Sunda yang mengacu pada data kerawanan tersebut. terlebih di wilayah selat sunda memiliki beberapa lembaga berwenang yang mampu menjalankan tugas di wilayah tersebut seperti Lanal Angkatan laut milik TNI AL, Polisi Perairan Polda Banten (Korpolairud Banten) maupun KSOP (Kantor syahbandar) Banten, maupun pihak bea dan cukai

Mengacu pada uraian tersebut, maka terkait upaya dalam penegakan supremasi hukum di perairan serta upaya dalam mendukung keselamatan pelayaran, maka diharapkan instansi tersebut dapat berperan aktif sesuai dengan tugas dan kewenangan instansinya, untuk menjamin visi penegakan supremasi hukum di perairan serta upaya dalam mendukung keselamatan pelayaran, Keberadaan Kapal dan pesawat udara Polri dapat digunakan secara bersama-sama dalam operasi di wilayah perairan akan sangat berdampak baik dalam mencegah dan menindak segala ancaman dan gangguan keamanan kapal-Kapal polisi yang memiliki fasilitas Hellypad guna pendaratan pesawat Helikopter. Sejak digabungkannya kembali dua 2 Direktorat yaitu Direktorat Kepolisian Perairan dan Direktorat Kepolisian Udara menjadi Korpolairud Baharkam Polri pada Bulan September tahun 2017, maka semakin menunjukkan eksistensinya dalam menjawab tantangan tugas Polri khususnya di wilayah perairan dan udara kedepan.

Sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemolisian, pada dasarnya dalam menegakan hukum di Indonesia, Polri memiliki kewenangan



dalam mengamankan dan menegakan hukum di semua matra, Baik darat, laut maupun udara, sehingga dengan adanya Korpolairud, merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari berbagai aspek, khususnya yang berhubungan dengan wilayah perairan dan laut. Dimana beberapa hal yang menjadi tugas pokok dari Korpolairud di implementasi dengan beberapa aktifitas, seperti yang pertama, melakukan patroli pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal; kedua melaksanakan sinergi melalui operasi penindakan dengan instansi berwenang; ketiga, melaksanakan Binmas dengan sosialisasi dampak dari illegal fishing dan berbagai bentuk kejahatan lain di wilayah perairan yang dilakukan kepada masyarakat; keempat, melaksanakan sistem pengawasan terintegrasi dengan system (VMS), kelima melaksanakan tindakan administrative seperti pemeriksaan dokumen-dokumen perizinan kapal. Dan ke enam mengoperasikan pesawat udara yang dimiliki oleh Polri untuk melaksanakan patroli melalui jalur udara, surveillance maupun SAR untuk mendukung informasi serta target operasi.

Upaya menghadapi tantangan tugas serta penanggulangan tindak pidana maupun kejahatan yang terjadi di wilayah perairan selat sunda sebagai jalur ALKI I dan sekitarnya yang merupakan program pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan selat sunda menjadikan jalur TSS (Traffic Separation Scheme), dihadapkan permasalahan urgensi di lapangan dalam hal kesiapan dan ketersediaannya.

2. Metode.

Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama. Metode ini diyakini lebih mendukung dalam usaha menjawab pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dimana fenomena yang ada dideskripsikan menjadi penjabaran yang lebih rinci kemudian dianalisis lebih lanjut oleh penulis (Iskandar, 2009: 86). Sehingga, menjadi pengetahuan (knowledge) yang



sesuai dengan fenomena yang terjadi di masa lampau terhadap fenomena yang muncul terkini. Teknik pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat primary data dan secondary data.

Dalam primary data. Peneliti melaksanakan pengambilan data dengan melaksanakan wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang sudah di rumuskan. Dalam secondary data, yakni mengambil dan menganalisis dari data-data yang telah ada sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Adapun cara pengumpulan data dari penelitian ini, yaitu dengan mencari data-data melalui studi kepustakaan (library research), seperti: buku, jurnal, artikel, buku dan jurnal online, situs web resmi, yang berkaitan dengan penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kondisi keamanan di wilayah Selat Sunda saat ini pada dasarnya sudah sesuai dengan tujuan utama masyarakat yaitu keamanan dan ketertiban yang sudah terlaksanakan. Penegakan hukum yang sudah terlaksanakan dengan menggunakan terobosan baru dan memaksimalkan dalam perannya dan juga meningkatkan sumber daya manusia untuk lebih mengefektifkan peran dan tugas dari Korpolairud untuk melaksanakan tugasnya. Bukan hanya Korpolairud dalam menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga peran masyarakat di wilayah Selat Sunda juga penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga diharapkan dapat membantu tugas dan peran dari Korpolairud dan petugas keamanan lainnya untuk meminimalisirkan kejahatan yang ada di wilayah Selat Sunda.

a. Peran Korpolairud di Wilayah Selat Sunda

Peran Korpolairud dalam menjaga keamanan di kawasan Selat Sunda sejalan dengan tugasnya antara lain memberikan perlindungan, pengayoman dan pengabdian kepada masyarakat, serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara, mendukung seluruh fungsi kepolisian dan kewilayahan, meningkatkan kapasitas untuk melaksanakan fungsi pelatihan polisi air dan udara, pengawasan,



pengendalian dan pemantauan keamanan air, serta organisasi pengaduan dan pengaduan masyarakat laut, serta organisasi fungsi pengintaian keamanan untuk pelaksanaan tugas dan kepengurusan Korpolairud, yang berguna bagi pelaksanaan tugas Korpolairud untuk mendukung Baharkam Polri dalam rangka terwujudnya keamanan dalam negeri

Dikorelasikan dengan peran Korpolairud dalam mendukung keamanan di wilayah Selat Sunda sejalan dengan peran Polri, khususnya Harkamtibmas dan aparat penegak hukum. Mengutamakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan keadaan masyarakat yang dinamis sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan supremasi hukum, serta terciptanya perdamaian, kemampuan memajukan dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk mencegah, mencegah, dan mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum serta bentuk ancaman lain yang berdampak dalam mengganggu masyarakat.

Peran Korpolairud dalam menjaga keamanan kawasan Selat Sunda sejalan dengan fungsi Polri, khususnya Harkamtibmas dan aparat penegak hukum. Harkamtibmas (menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat) itu sendiri adalah tanggung jawab semua orang untuk semua organisasi yang bertanggung jawab atas peran utama mereka sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat di wilayah perairan. Sehingga semua upaya strategis dilakukan untuk memaksimalkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta seruan dan pesan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga dengan mengedepankan dan juga meningkatkan keamanan di wilayah Selat Sunda diharapkan kejahatan yang ada akan menurun sehingga terciptanya masyarakat yang ngaman dan sejahtera dalam beraktifitas.



Peranan Korpolairud juga didukung dengan program pemerintah seperti Traffic Separation Scheme (TSS) yang merupakan sistem rute manajemen lalu lintas maritim yang pengaturannya berada di bawah Internasional Maritime Organization (IMO). Jalur lalu lintas maritim ini menunjukkan arah umum kapal di zona terkait dan semua kapal yang berada dibawah navigasi TTS semuanya akan berlayar ke arah yang sama secara beraturan. Penerapan dari TTS tersebut akan membantu untuk mengurangi dan juga mengelola lalu lintas di arus lalu lintas yang berlawanan, membantu pengelolaan kapal yang hendak masuk atau keluar dari area pelabuhan, serta arahan tentang jarak yang aman antar kapal, dan menyediakan rute untuk deep draught vassels

Program pemerintah Traffic Separation Scheme (TSS) berjalan dengan aman dan semestinya, karena TSS sendiri menjamin keamanan dan keselamatan dalam lalu lintas pelayaran. Sehingga TSS dapat memaksimalkan peranan Korpolairud dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Selat Sunda sehingga akan terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim

Peran Korpolairud untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Wilayah Selat Sunda juga dibantu oleh aparat/lembaga lainnya dengan gabungan-gabungan peran antar aparat/lembaga. Peran Korpolairud dibantu dengan Dipolairud dalam menjaga keamanan di wilayah Selat Sunda yang sesuai dengan tupoksi yaitu melaksanakan penyusunan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pelibatan fungsi Kepolisian Udara dalam keterlibatan penggelaran operasi Kepolisian baik di tingkat pusat maupun dalam kewilayahan.

Ditpoludara melaksanakan transportasi udara dan patroli udara termasuk kegiatan pencairan dan pengejaran pelaku dalam tindak pidana dengan mobilitas tinggi serta kegiatan pertolongan/ penyelamatan dalam



kegiatan pengaman wilayah Selat Sunda. Bukan hanya itu saja, tetapi Ditpoludara juga memiliki tugas pokok untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) perairan, dalam rangka preemptive, preventif, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Selat Sunda.

Dengan terbatasnya anggaran, alat utama, kompensasi dan tunjangan Korpolairud menjadikan lebih kompeten dan handal dalam menjalankan fungsinya. Ketahanan fisik dan mental harus selalu terjaga untuk tetap menjadikan korpolairud tetap solid. Dan sulit dijajaki serta ditaklukan kawanan para penjahat selalu mengincar kekayaan dan keamanan Selat Sunda. Sistem penugasan yang sama yaitu BKO kewilayahan dan terpusat sehingga memudahkan saat berkoordinasi antara pilot dan komandan kapal saat melaksanakan operasi. Kepastian dan kesatuan perintah mutlak dalam menjalankan tugas operasi agar target kejahatan dapat di tangani dan bahkan dimusnahkan. Ketepatan waktu dalam operasi dapat terkoordinasi dengan baik dan efektif sehingga penanganan target tepat.

Saat ini di Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri telah memiliki SDM yang sangat memadai hal ini dibuktikan dengan kemampuan anggota baik dari segi dikbangum, dilbangspes maupun kemampuan personel, hal ini perlu terus di tingkatkan dan di latih. Meminimalisir atau menurunkan angka Kejahatan maupun angka kecelakaan di laut/perairan dengan melakukan penegakkan hukum, Giat SAR, meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembinaan, Pemolisian masyarakat, dengan melaksanakan sambang Nusa, sambang Nelayan, sosialisasi maupun pendekatan kepolisian kepada masyarakat. Sehingga tujuan dari Linyonyamas, Harkamtibmas, dan penegakan Hukum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga keamanan dalam Negeri khususnya di wilayah



Perairan dapat tercapai. Sehingga peran Korpolairud di Wilayah Selat Sunda diantaranya adalah Mencegah dan menindak aksi Kriminalitas, Menjaga Kenyamanan di Wilayah Selat Sunda, Menciptakan Kesejahteraan di Wilayah Selat Sunda dan Menjaga kelancaran kegiatan beraktivitas di Wilayah Selat Sunda.

b. Indikasi Keberhasilan Korpolairud di Selat Sunda.

Korpolairud dalam melakukan tugas, peran, serta berupaya dalam menjaga keamanan di wilayah Selat Sunda memiliki keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya selama ini. Wujud keberhasilan Korpolairud sebagai penjaga keamanan di wilayah Selat Sunda yaitu dengan adanya beberapa hasil gakum pada 2 bulan terakhir di wilayah perairan selat sunda yang mencakup 2 wilayah Polda yaitu Polda Lampung dan Polda Banten antara lain Pada tanggal 25 Juni 2021 KP. Gagak – 3011 melakukan penangkapan kepada KM. tanpa nama dengan 8 orang ABK yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Lampung; Pada tanggal 15 Juni 2021 KP. Perkutut – 3005 melakukan penangkapan terhadap terduga penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 7,34gram narkoba jenis sabu-sabu di wilayah perairan Lampung, Pada 26 Mei 2021 KP. Kenari – 3007 melakukan penangkapan terhadap terduga pencurian pada cagar budaya Kapal Perang Karam di wilayah perairan Banten, Menjadi unsur dalam program nasional TSS Selat Sunda dan Melaksanakan penangkapan perkara penyelundupan Baby Lobster (Benur) sebanyak 4135 ekor.

Keberhasilan Ditpolairud Korpolairud dalam pengamanan Selat Sunda adalah dapat mengidentifikasi pelaku tindak pidana penyelundupan menggunakan perahu boat cepat dengan efektif dan efisien karena almasius Ditpolairud memiliki kecepatan dalam mendekati pelaku tindak pidana. Selain itu Ditpolairud berhasil menangkap pelaku



tindak pidana penyelundupan dengan melakukan tindakan represif berupa penembakan pada alat pendorong kapal pelaku penyelundupan. Serta keberhasilan yang di capai oleh Kapal Polisi Ditpolairud Korpolairud dalam menjaga keamanan di selat sunda terciptanya alur pelayaran yang aman dan kondusif.

c. Hambatan dan tantangan Korpolairud di Selat Sunda

Dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi pokok Korpolairud juga memiliki kendala dan juga hambatan dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi pokoknya dalam melaksanakan pengamanan di wilayah Selat Sunda. Seperti halnya kendala dan hambatan dalam kondisi cuaca atau laut yang tidak dapat diprediksi yang bisa berubah-ubah sangat cepat, keterbatasan alat utama dalam menghadapi cuaca buruk,

Dengan fakta bahwa sistem pengawasan keamanan (MonitoringI di Selat Sunda belum terintegrasi, serta terbatasnya sarana dan prasarana sistem pengawasan dan pengintaian serta minimnya penggunaan teknologi mutakhir membuat beberapa wilayah tidak terurus. Karakteristik masing-masing badan dalam penyelenggaraan keamanan Selat Sunda adalah saling mandiri sesuai peran dan tanggung jawabnya, oleh karena itu aparat penegak hukum di Selat Sunda melakukan upaya pengamanan sektoral terkait keamanan laut, menurut terhadap kekuasaan yang mereka miliki berdasarkan kekuasaan internal masing-masing, mereka memiliki undang-undang dan pedoman.

Dan juga masih terbatasnya pesawat udara yang dilengkapi dengan teknologi tinggi untuk pelaksanaan patroli udara kepolisian dalam rangka pengamanan wilayah selat sunda sehingga pelaksanaan patroli akan terbentur dengan kondisi pesawat udara yang melaksanakan operasi pengamanan. Selain hal tersebut masih terbatasnya awak pesawat udara yang mengawaki pesawat udara tersebut sehingga awak pesawat tidak



memiliki waktu istirahat yang cukup ketika melaksanakan operasi kepolisian.

“Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi Kapal Polisi Ditpolair Korpolairud dalam melaksanakan Pengamanan di wilayah selat sunda yaitu kondisi cuaca atau laut yang berubah-ubah sangat cepat yang tidak bisa di prediksi, keterbatasan alat dalam menghadapi cuaca buruk.

Sistem pengawasan keamanan yang tidak terintegrasi di selat sunda dan keterbatasan sarana dan prasarana untuk sistem pengawasan, sistem pengamatan maupun sistem pengintaian yang belum menggunakan teknologi terbaru, sehingga berdampak padaq beberapa area yang dibiarkan tanpa pengawasan. Karakteristik masing-masing instansi dalam pelaksanaan pengamanan di Selat Sunda dilaksanakan secara sendiri-sendiri (sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya instansinya masing-masing) , sehingga instansi penegak hukum di Selat Sunda melakukan tindakan pengamanan terkait keselamatan di laut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di bawahnya. undang-undang dan pedoman internal masing-masing (terkesan ada ego sektoral). (Sherly Anggraini, S.ST., M.Han. Komandan Kapal Polisi Sanjaya – 7017, yang diwawancarai pada 7 Juni 2021).

Kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya pesawat udara yang dilengkapi dengan teknologi tinggi untuk pelaksanaan patroli udara kepolisian dalam rangka pengamanan wilayah selat sunda sehingga pelaksanaan patroli akan terbentur dengan kondisi pesawat udara yang melaksanakan operasi pengamanan. Selain hal tersebut masih terbatasnya awak pesawat udara yang mengawaki pesawat udara tersebut sehingga awak pesawat tidak memiliki waktu istirahat yang cukup ketika melaksanakan operasi kepolisian. Dan setiap wilayah memiliki hambatan dan tantangan yang lainnya, seperti yang dirasakan pada Ditpolairud



Polda Lampung yang memiliki hambatan yang kurangnya almatsus kapal Type C1 yg belum sesuai tipe karakteristik wilayah Lampung, saat ini Ditpolairud Polda Lampung masih menggunakan kapal type C2 yang hanya terbatas untuk melaksanakan patroli perairan, dan kurangnya personel yang tidak sesuai DSP.

Dan sedangkan pada Ditpolairud Polda Banten juga memiliki hambatan dan tantangan yang tidak jauh berbeda dengan Ditpolairud Polda Lampung. Ditpolairud Polda Banten belum memiliki kapal patrol type C1 untuk mencapai perairan Selat Sunda dengan karakteristik gelombang yang cukup besar, dan kapal Ditpolairud hanya memiliki satu kapal tipe C3 yang hanya dapat memiliki karakteristik menjangkau pesisir pantai, kurangnya peralatan kelautan berupa kapal patroli terkait dengan luas wilayah tanggung jawabnya, kurangnya personel di Ditpolairud dibandingkan wilayah perairan yang memiliki wilayah sangat luas, dan jumlah orang yang dilayani, dan kesadaran hukum masyarakat laut masih rendah, serta ego sektoral antar penguasa.

Wilayah selat sunda memiliki daerah atau topografi wilayah yang sangat luas dan memiliki gugusan pulau serta cekungan kedalam laut, selain itu letak selat sunda sebagai penghubung antara pulau Jawa dengan pulau Sumatera & merupakan penghubung antara laut China selatan dengan samudra Hindia, terdapat beberapa pulau dan memiliki gunung Vulkanik aktif yang setiap saat menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Selain itu cuaca yang kurang menentu, tingginya Curah hujan, gelombang dan angin sangat berpengaruh terhadap penugasan kapal Polisi di daerah tersebut.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, mengacu pada Tugas Korpolairud di Selat Sunda meliputi preemtif, preventif, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman



dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Selat Sunda. Sementara itu, peran Ditpoludara dalam menjaga keamanan di kawasan Selat Sunda, menurut Tupoksi pokoknya, adalah mempersiapkan, merencanakan, menyelenggarakan, dan melaksanakan peran serta fungsi kepolisian udara dalam keikutsertaan pengerahan operasi kepolisian baik di pusat dan di daerah

Standar keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Selat Sunda perlu dibuatkan standar keamanan keterpaduan antara instansi yang berwenang guna rujukan anggota bertugas. Secara umum pelaksanaan pengamanan di Selat Sunda sudah berjalan, namun dalam mengawasi wilayah yang cukup luas dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Peranan Korpolairud juga didukung dengan program pemerintah seperti Traffic Separation Scheme (TSS) yang merupakan sistem rute manajemen lalu lintas maritim yang pengaturannya berada di bawah Internasional Maritime Organization (IMO).

Ditpolairud sendiri berugas membantu Kakorpolairud dalam rangka menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/ musibah. Ditpolairud dalam menunjang tugasnya dalam menjaga keamanan di Selat Sunda menggunakan Sistem IT (Infomasi Teknologi) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Buzan, B. (2007). *What is national security in the age of globalisation?* London: School of Economic and Politik Science.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed.* Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Danial. (2020). Keamanan dan Pertahanan di Selat Sunda, studi alur laut kepulauan Indonesia. *Idea Hukum. Vol. 6. No.1.*
- Danial. (2020). Keamanan dan pertahanan di Selat Sunda, Studi Alur laut



Kepulauan. *Idea Hukum*. Vol.6.No.1.

- David, F. R. (2013). *Strategic management Concepts (14th edition)*. London: Pearson Education Limited Essex.
- Douhet Guilio. (1999). *Military Times Classic, the command of the air*. UK: Military-times. co. uk.
- Elvis. (2020). Implementasi Pengamanan Selat Sunda dalam rangka pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia . *Strategi Pertahanan Laut*. Vol.6. No.1.
- Elvis, M. F. (2020). Implementasi pengamanan selat sunda dalam rangka pengendalian alur laut kepulauan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*. Vol. 6. No.1.
- Evi Rinawati, M. (2018). Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. *JOM FISIP*, Vol.5, Edisi II, juli - Desember , 2.
- I Nengah Putra A., A. H. (2016). Analisa peluang dan ancaman keamanan maritim Indonesia sebagai dampak perkembangan lingkungan Strategis. *ASRO - STTAL*, Vol.6, Juli - Desember.
- Kapolri. (2017). *Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2017*. Jakarta: Mabes Polri.
- Kardi, K. (2013). *Strategi Pertahanan Udara : karakteristik air power dan strategi pertahanan Udara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.